

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai data pendukung penelitian, namun setelah mendalami riset kali ini peneliti menemukan bahwa fakta tentang peran *Pentahelix* untuk mendukung proses rehabilitasi di suatu lembaga tidak ditemukan. Oleh karena itu peneliti memberikan gambaran mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran *Pentahelix* yang relevan, sebagai berikut:

1. **Setya Haksana, 2022. *Peningkatan Peran Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Kesiapsiagaan Mengenai Bencana Multihazard Di Kabupaten Banyuwangi.***

Jurnal ini membahas tentang pentingnya kolaborasi *Pentahelix* (pemerintah, akademisi, masyarakat, media massa, dan dunia usaha) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana multihazard di Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wilayah rawan bencana di Indonesia. Kolaborasi ini melibatkan peran regulator dari pemerintah, kontribusi konsep dan inovasi dari akademisi, akselerasi dari masyarakat, peran pengganda dari media massa, dan dorongan dari dunia usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebesar 77,77%. Fokus Group Discussion (FGD) juga mengungkapkan bahwa setiap

unsur *Pentahelix* memiliki peran masing-masing dalam kolaborasi kesiapsiagaan bencana.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya integrasi kolaborasi *Pentahelix* dalam kebijakan dan praktik kesiapsiagaan bencana di Indonesia, terutama dalam wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Upaya mitigasi, respons dan pemulihan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif melalui sinergi antara berbagai pihak terkait.

2. Lina Putri. 2022. *Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi*

Jurnal ini membahas tentang kolaborasi *Pentahelix* dalam penanganan pasca bencana gempa bumi di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat disimpulkan:

- a. Pemerintah, sektor bisnis, akademisi, komunitas, dan media memegang peran penting dalam penanganan bencana.
- b. Kolaborasi *Pentahelix* melibatkan semua pihak untuk mengatasi kerusakan dan kerugian pasca bencana.
- c. Pemerintah berperan sebagai otoritas yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam penanganan bencana.
- d. Sektor bisnis, akademisi, komunitas, dan media berperan sesuai dengan visi, misi, dan fungsi masing-masing.
- e. Respon terhadap situasi pasca bencana terjadi dalam tiga fase: pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- f. Pekerja sosial memiliki peran penting sebagai relawan, perencana program, dan pelaksana program bencana.

- g. Kolaborasi Penta Helix diperlukan untuk memastikan setiap orang dapat mandiri secara sosial dan ekonomi pasca bencana.

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan penanganan pasca bencana gempa bumi dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak.

3. Andre Yeremia. 2022. *Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Anak Terlantar di Kabupaten Karawang*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih mudahnya ditemui Anak Terlantar di Kabupaten Karawang, yang harus hidup di jalanan untuk mencari uang. Masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap Anak Terlantar, sehingga peran pemerintah dalam melindungi mereka menjadi penting. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi Anak Terlantar di Kabupaten Karawang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Data diambil dari narasumber yang dipilih dengan *nonprobability* sampling menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Terlantar dan Lanjut Usia.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi terkait program Dinas Sosial Kabupaten Karawang, yang menyebabkan program belum efektif dalam mengurangi jumlah Anak Terlantar dan merehabilitasi mereka sesuai target yang ditetapkan.

Dalam kesimpulan, peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi Anak Terlantar di Kabupaten Karawang masih belum optimal karena norma atau aturan yang belum disosialisasikan dengan baik. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi bagi Anak Terlantar.

Setelah melihat dan menganalisa penelitian terdahulu peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih sangat minim penelitian yang membahas tentang peran *Pentahelix* dalam proses rehabilitasi, peran *Pentahelix* masih banyak dibahas dalam upaya program kebencanaan sedangkan tentang program rehabilitasi masih sangat jarang muncul, namun peneliti dari beberapa penelitian diatas menjadi memiliki gambaran tentang bagaimana seharusnya peran *Pentahelix* diterapkan dalam sebuah konsep penanganan, dalam hal ini dalam konteks program rehabilitasi yang dilakukan di Pondok Rehabilitasi Selaras Jiwa Kawasan Geopark Kebumen.

Peneliti memilih penelitian diatas untuk memberikan gambaran tentang bagaimana peran *pentahelix* diimplementasikan pada bidang kesejahteraan sosial, selain itu penelitian terdahulu yang dipilih ini sesuai dengan topik penelitian yang diambil mengenai bagaimana aktor *pentahelix* berperan. Peneliti mendapatkan pandangan dan gambaran mengenai bagaimana setiap peran dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media berperan sesuai porsinya di dalam sebuah program ataupun program, sehingga penelitian yang dipilih ini penting dan relevan dengan penelitian yang diambil mengenai Peran *Pentahelix* dalam Rehabilitasi di Pondok Rehabilitasi Selaras Jiwa.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Tentang Peran

1. Konsep Peran

Peran dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in understanding*”, yang berarti tugas atau kewajibanseseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Menurut terminologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Terdapat dua macam peran yaitu; peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat.

Peran adalah kegiatan yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi dan biasanya diatur dalam aturan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Sedangkan peran menurut Soekanto (2017) mengartikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Bruce J. Cohen dalam Rahmawati (2019: 25) membagi peran kedalam beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (*anacted role*) yaitu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran;
- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dalam menjalankan peran;
- c. Konflik Peranan (*role conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain;

- d. Kesenjangan peranan (*role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional; Kegagalan peranan (*role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- e. Model peranan (*role model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya dapat dicontoh, ditiru dan diikuti;
- f. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada mereka yang sedang menjalankan perannya.

Menurut Levinton dalam Soekanto (2017: 213) menyatakan bahwa peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Fungsi yang dimaksud adalah apabila seseorang menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kedudukannya maka orang atau organisasi tersebut berperan. Penyesuaian diri yang dimaksud adalah perilaku-perilaku yang ditampilkan dibatasi oleh kedudukannya dan peran yang dimiliki. Peran sebagai suatu proses merujuk pada tahapan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilakukan oleh pemegang peran. Soekanto (2017) membagi peran menjadi tiga hal sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2017: 242), Peran dibagi menjadi tiga macam yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif merupakan peran yang kedudukannya di pilih oleh anggotanya secara langsung, peran aktif ini merupakan peran yang sangat penting didalam sebuah organisasi. Contohnya seperti pengurus atau pejabat. Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya, yang berfungsi untuk memberikan sumbangan. yang berharga untuk kelompok itu sendiri. Peran pasif merupakan sumbangan anggota kelompok, atau memberikan kelompok lain kesempatan untuk melaksanakan kegiatan agar sebuah organisasi tersebut berjalan dengan baik, sumbangan yang diberikan biasanya berupa keperluan kelompok berupa barang atau materil.

Fungsi peran dalam masyarakat adalah sebagai berikut: pertama, memberi arah pada proses sosialisasi. Kedua, pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan. Ketiga, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Keempat, menghidupkan sistem pengendalian kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2014: 160).

Dari beberapa pengertian di atas, peran merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang yang di lakukan di masyarakat sesuai dengan posisi atau kedudukan di dalam masyarakat. Seseorang di harapkan menjalankan

kewajibannya sesuai dengan peranannya baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

2.2.2 Tinjauan tentang Rehabilitasi

Pada tinjauan tentang Rehabilitasi terdiri dari penjelasan mengenai pengertian rehabilitasi, fungsi rehabilitasi, tujuan, jenis, dan komponen rehabilitasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang memiliki arti kemampuan, dari kata tersebut maka rehabilitasi diartikan sebagai upaya mengembalikan kemampuan seseorang. Menurut Ahmad Tohamuslim (2008), rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan, yang secara umum dapat diartikan sebagai pembedahan, perbaikan, pengembalian kepada sesuatu yang lebih baik

Hal ini sejalan dengan Rehabilitasi Sosial menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Rehabilitasi merupakan sebuah upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan. Sedangkan rehabilitasi bagi penyandang

disabilitas adalah proses rufungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk memungkinkan seseorang mampu dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar didalam kehidupan masyarakat (Dorang L dan Rini Hartini, 2019)..

2. Tujuan Rehabilitasi

Dengan begitu program rehabilitasi ditujukan agar individu atau penyandang disabilitas memperoleh kemandirian baik secara fisik, mental, psikologis, dan sosial. Sehingga nantinya terdapat keseimbangan di anantara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Hal tersebut dapat menghilangkan sikap ketergantungan terhadap orang lain. Untuk mencapai semua itu diperlukan program rehabilitasi yang dilakukan secara komprehensif.

3. Fungsi Rehabilitasi

Menurut Kandel (2018), terdapat empat fungsi rehabilitasi secara medis yaitu kuratif, rehabilitative, promotive, dan preventif. Adapun penjelasan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Kuratif

Merupakan sebuah layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan atau masalah yang dialami oleh individu yang membutuhkan layanan khusus, dalam berbagai bidang seperti gerak motorik, komunikasi, psiko-sosial, dan pendidikan.

b. Rehabilitatif

Merupakan layanan yang berfungsi sebagai pemulihan bagi individu yang mengalami permasalahan terkait dengan gerak motorik, komunikasi, psiko-sosial, dan pendidikan

c. Promotif

Merupakan layanan yang berfungsi untuk peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki, dengan harapan individu tersebut mengalami peningkatan menuju ke dalam kondisi normal secara optimal.

d. Preventif

Merupakan layanan pencegahan kondisi kedisabilitas, agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Adanya fungsi pencegahan melalui layanan rehabilitasi diharapkan individu yang mengalami permasalahan khusus dapat terhindar dari permasalahan kedisabilitas yang lebih berat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi rehabilitasi merupakan sebuah proses memulihkan atau mengembalikan fungsi sosial, fisik, dan mental individual atau kelompok dengan cara memotivasi mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing.

4. Jenis Rehabilitasi

Syamsi dan Haryanto (2018), mengatakan bahwa berdasarkan jenisnya rehabilitasi terbagi menjadi tiga jenis dalam pelaksanaannya, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi, ketiga jenis tersebut memiliki

hubungan yang erat satu sama lain dalam menangani kasus. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis rehabilitasi sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan kesehatan penyandang masalah melalui layanan kesehatan yang tersedia dan bersifat penyembuhan serta pemulihan bagi kesehatan penyandang masalah. Menurut Ahmad Tohamuslim (2008), rehabilitasi medis merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami permasalahan baik gangguan fungsi atau cedera, kehilangan fungsi atau disabilitas, yang disebabkan oleh susunan otot tulang, syaraf, susunan jantung, dan paru-paru. Serta gangguan mental dan sosial yang menyertai kedisabilitas tersebut. Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis terdiri dari pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan. Serta Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik.

Kemudian pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit umum, biasanya rumah sakit tersebut dilengkapi dengan layanan psikologis yang diberikan oleh seorang psikolog dan layanan yang bersifat sosial dilakukan oleh pekerja sosial medis. Kemudian rehabilitasi medis yang dilakukan pada rumah sakit jiwa harus memerlukan layanan psikiater dan layanan penunjang oleh seorang pekerja sosial medis untuk menangani dalam hubungan dengan masyarakat.

Tujuan pemberian rehabilitasi medis adalah untuk memulihkan sebagian atau seluruh kemampuan fisik, sensorik, dan mental penyandang masalah yang hilang dikarenakan sakit, cedera, dan lain sebagainya. Sedangkan Menurut Dorang L dan Rini Hartini (2019), tujuan dari rehabilitasi medis terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1) Jangka Pendek

Pasien dapat segera keluar dari tempat tidur dan dapat berjalan tanpa atau dengan alat, setidaknya pasien dapat memelihara dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain.

2) Jangka Panjang

Pasien dapat hidup kembali dan beraktifitas di tengah masyarakat, setidaknya mampu untuk memelihara dirinya sendiri. Lalu dapat kembali kedalam kehidupan atau kondisi semula paling tidak mendekatinya.

b. Rehabilitasi Vokasional

Epi Supiadi (2005) menjelaskan rehabilitasi vokasional merupakan upaya pemberian bekal keterampilan kerja bagi klien sehingga klien memiliki kesiapan untuk mandiri secara ekonomi di masyarakat. Sedangkan menurut Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI (2020), layanan rehabilitasi vokasional adalah upaya dalam memberikan berbagai keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi kepada klien untuk menuju ke arah pengembalian kemampuan dalam bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan fisik dari

penyandang disabilitas. Terdapat beberapa jurusan vokasional seperti auto mekanik mobil, motor, operator computer, teknik komputer, fotografi, elektronika, musik, *massage*, dan sebagainya.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses perbaikan dan pemulihan yang dilakukan secara terpadu, baik fisik, mental, dan sosial kepada individu yang pernah mengalami permasalahan narkoba, narapidana, dan sebagainya agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menurut Permensos No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi, rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Selanjutnya tujuan dari rehabilitasi yaitu pertama untuk memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran, percaya diri, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat yang berada di lingkungan sosial. Kedua untuk memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selanjutnya menurut Alviansyah (2018), untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

1) Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud adalah mencegah munculnya masalah sosial penyandang disabilitas, baik itu masalah yang datang dari diri dia sendiri maupun masalah yang berasal dari lingkungannya.

2) Tahap Rehabilitasi

Pada tahap ini rehabilitasi yang diberikan melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, dan pembinaan mental. Bimbingan sosial yang diberikan dilakukan secara individu maupun kelompok. Bimbingan ini diberikan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap fungsi sosial dan menggali potensi positif seperti minat, bakat, hobi, sehingga munculnya kesadaran akan harga diri serta tanggung jawab sosial.

Bimbingan keterampilan diberikan kepada individu agar mereka menyadari terhadap keterampilan yang dimiliki dan jenis keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Bimbingan ini berikan agar mereka dapat menjadi mandiri dalam hidup bermasyarakat dan berguna bagi banyak orang.

Bimbingan dan penyuluhan diberikan kepada keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal penyandang masalah. Bimbingan dan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial keluarga dan lingkungannya, sehingga mereka dapat

benar-benar memahami mengenai program rehabilitasi dan kondisi penyandang masalah.

3) Resosialisasi

Merupakan segala upaya untuk menyiapkan penyandang disabilitas agar mampu untuk berintegrasi di dalam kehidupan masyarakat. Resosialisasi adalah sebuah proses penyaluran dan penempatan penyandang disabilitas setelah mendapat bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi individu. Pada tahap ini menentukan apakah individu penyandang disabilitas mampu dan sudah siap baik secara fisik, mental, emosi, dan sosial dalam berintegrasi dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini juga dapat diketahui apakah masyarakat sudah siap untuk menerima kembali kehadiran dari penyandang disabilitas.

4) Pembinaan tindak lanjut (*after care*)

Pembinaan tindak lanjut dilakukan agar keberhasilan klien atau individu dalam proses rehabilitasi yang telah disalurkan lebih sempurna. Adanya kegiatan pembinaan tindak lanjut dapat mengetahui apakah klien bisa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan apakah lingkungan masyarakat menerima dia.

Tujuan dari adanya pembinaan tindak lanjut yaitu untuk memelihara, memantapkan, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, dan mengembangkan rasa tanggung jawab, serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pembinaan tindak lanjut penting

untuk dilaksanakan karena di samping klien termonitoring kegiatannya, juga dapat mengetahui keberhasilan dari program rehabilitasi yang telah diberikan.

5. Komponen Rehabilitasi

Menurut Dorang L dan Rini Hartini (2019), rehabilitasi terdiri dari serangkaian upaya yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis untuk memulihkan keberfungsian sosial seseorang melalui kegiatan, sebagai berikut:

a. Motivasi dan diagnosis psikososial/asesmen kebutuhan

Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menumbuhkan kemauan penyandang disabilitas dan keluarga untuk mengikuti proses rehabilitasi serta upaya untuk mengidentifikasi situasi psikososial, mengidentifikasi antara stress dan kekuatan, persepsi dan sikap tentang proses rehabilitasi, termasuk motivasinya. Kemudian melakukan identifikasi terhadap pihak lain yang penting dalam kehidupan penyandang disabilitas, serta lingkungan sekitar berpengaruh atau dapat digunakan sebagai sistem sumber.

b. Perawatan dan pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan merupakan kegiatan untuk memberikan perawatan, perhatian, bimbingan dan dukungan untuk memenuhi dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial dan spiritual penyandang disabilitas. Perawatan dan pengasuhan menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari penyandang disabilitas agar dapat menjalani dan menikmati hari-harinya dengan potensial.

c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan kegiatan memberikan pelatihan keterampilan dan kerja praktis yang sesuai dengan kondisi kedisabilitas seseorang, yang bertujuan untuk memungkinkan penyandang disabilitas dalam melakukan sesuatu secara mandiri. Sedangkan pembinaan kewirausahaan merupakan bimbingan pengembangan usaha mandiri, yang memungkinkan dikembangkan di lingkungan tempat penyandang disabilitas.

d. Bimbingan mental dan spiritual

Bimbingan mental dan spiritual merupakan kegiatan meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, meningkatkan toleransi beragama, meningkatkan pemahaman menjadi warga negara dan meningkatkan pemahaman terhadap diri dan lingkungannya.

e. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan fisik penyandang disabilitas secara optimal melalui bimbingan kebugaran fisik dan bimbingan aktivitas sehari-hari.

f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan kemampuan dalam relasi sosial dan interaksi sosial dengan lingkungan.

g. Pelayanan Aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam menjangkau layanan sosial yang dibutuhkan, ataupun menjangkau area dan sarana umum, Aksesibilitas terhadap lingkungan fisik dan non fisik, berupa sarana prasarana umum; jalan, gedung maupun teknologi layanan, informasi, dan terhadap fasilitas dan layanan lainnya.

h. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan diri sesuai dengan minat dan bakat, serta potensi dari penyandang disabilitas dalam bidang sosial, psikologis dan ekonomi. Pemberdayaan yang diberikan disesuaikan dengan potensi dan sistem sumber lingkungan yang ada di sekitar penyandang disabilitas.

i. Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial

Bantuan dan asistensi sosial adalah pemberian bantuan berupa alat bantu disabilitas dan bantuan pengembangan usaha mandiri. Sedangkan asistensi sosial merupakan kegiatan untuk memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas dalam melakukan pengembangan usaha mandiri, dan penggunaan alat bantu disabilitas.

j. Bimbingan Resosialisasi dan Reintegrasi

Bimbingan resosialisasi dan reintegrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar dapat menerima kehadiran penyandang disabilitas di tengah-tengah keluarga dan

lingkungannya. Bimbingan dan motivasi diberikan kepada penyandang disabilitas untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Sedangkan bimbingan kesiapan dan peningkatan keterampilan pengasuhan dan perawatan keluarga diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas.

k. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas tetap bisa melakukan aktivitas yang telah dilatihkan dan diberikan dalam proses rehabilitasi. Kegiatan berupa pemantauan dan bimbingan yang dilakukan secara langsung pada lingkungan kediaman penyandang disabilitas.

l. Rujukan

Rujukan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan layanan yang dibutuhkan sesuai dengan pengembangan dirinya, yang dimana layanan tersebut tidak dimiliki oleh lembaga pelayanan sebelumnya.

2.2.3 Tinjauan tentang Model *Pentahelix*

Penta helix adalah pengembangan dari konsep triple helix dan quadruple helix, yang secara etimologi menggabungkan kata "penta" yang berarti lima, dan "helix" yang berarti jalinan. Konsep *Penta-Helix* yang bersinergi melibatkan berbagai aktor sesuai dengan bidangnya. Model ini dikenal dengan konsep ABCGM, yang terdiri dari *Academician* (akademisi), *Business* (bisnis), *Community* (masyarakat), *Government* (pemerintah), dan *Media* (media). Keberhasilan inovasi dalam konsep ini sangat bergantung pada adanya sinergi yang

kuat dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam implementasinya. Model *Penta-Helix* memiliki manfaat yang signifikan dalam mengelola kompleksitas berdasarkan peran aktor yang terlibat (Slamet et al., 2017:137).

Menurut Aulia Putri (2020), model *Pentahelix* adalah kerangka kerja yang melibatkan lima pihak yang berbeda, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat peran antar sektor-sektor tersebut guna mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan suatu program atau proyek. Melalui Sinergitas ini, masing-masing pihak dapat saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan kompetensi untuk mencapai tujuan bersama.

Di sisi lain, dalam penelitian oleh Rahmat Hidayat (2019), model *Pentahelix* digambarkan sebagai suatu bentuk interaksi yang harmonis antara kelima sektor tersebut dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Model ini memberikan perhatian khusus terhadap peran media sebagai penghubung antara pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan media, informasi dan pesan-pesan penting dapat disampaikan dengan lebih efektif dan mencapai audiens yang lebih luas.

Dalam esai oleh Dimas Dwi Pangestu (2021), ditekankan bahwa model *Pentahelix* adalah fondasi yang penting untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi model ini bergantung pada peran antara kelima pihak yang terlibat, di mana akademisi memberikan pengetahuan dan penelitian yang mendukung, bisnis menyediakan sumber daya dan keahlian, pemerintah memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung,

masyarakat menjadi pengguna dan peserta aktif, dan media berperan dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik.

Dengan demikian, konsep *Pentahelix* merupakan kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan berkelanjutan, inovasi, pariwisata, dan lain sebagainya.

1. Pemerintah

Dalam hal ini, pemerintah seringkali dipandang sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab utama dalam implementasi kebijakan. Pandangan ini hadir tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara maju dan berkembang lainnya. Dewan memainkan peran penting sebagai pembuat keputusan dan regulator. Selain itu menurut Nurmalia & Zaenuri, (2018), Dewan juga bertindak sebagai otoritas pengawasan dalam semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, promosi, pemberian pembiayaan, perizinan, program, peraturan, kegiatan pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan jaringan inovasi. dan kemitraan. sektor swasta. Namun dalam kaitannya dengan lembaga peradilan, keberadaannya biasanya merugikan masyarakat dan berujung pada litigasi

2. Swasta

Sebagai seorang pengusaha, penting bagi seseorang untuk menggunakan potensi dan keahliannya dalam mengembangkan bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Selain itu, seorang pengusaha dapat berkembang dari skala mikro hingga skala

besar. Pelaku ekonomi juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mengadakan seminar dan diskusi bekerja sama dengan Peneliti dan pemerintah (Yuningsih et al., 2019).

Vira Annisa Utami Nasution (2021) menambahkan bahwa para pelaku bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan nilai dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di era digital dan modern ini, peran teknologi informasi menjadi kunci bagi para pelaku bisnis dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pelaku ekonomi dapat berkontribusi dalam memajukan dan meningkatkan produktivitas

3. Akademisi

Menurut Handy Aribowo (2018) Pengembangan SDM oleh aktor akademi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM berbasis kompetensi. Kemudian peran akademi dalam konsep *Pentahelix* dapat dilihat dalam upaya memberikan wawasan dan juga membantu dalam menganalisis informasi faktual industri tentang keberlanjutan dalam kaitannya dengan kemajuan bidang terkait melalui penelitian, analisis, dan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia industri adalah yang pertama memandu keberlangsungan industri dan menentukan daya saing industri.

4. Masyarakat

Menurut Yuningsih et al, (2019) masyarakat memiliki peran sebagai akselerator, fasilitator dan penghubung antar sektor selama proses dari awal

sampai akhir. Sebuah komunitas terdiri dari orang-orang di satu tempat yang memiliki tujuan yang sama. Dalam menjalankan peran masyarakat, birokrasi menjalankan kekuasaan diskresi yang mengakibatkan masyarakat berusaha menempuh berbagai tindakan eksekutif, seperti B. Rujukan aturan dan regulasi untuk melakukan pengaruh. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keuntungan dalam pelaksanaan program tertentu yang sedang berjalan (Partisipasi masyarakat sebagai narasumber utama sebagai first responder. Bentuk kontribusi masyarakat dapat berupa kegiatan yang mendukung pelaksanaan aktor lain.

5. Media

Media massa sebagai kelompok kepentingan yang memiliki informasi dan bertindak sebagai platform periklanan dan juga menciptakan citra program. Media juga merupakan jaringan penghubung dengan pemerintah untuk publikasi dan promosi. Media cetak dan media online merupakan penghubung penting antara masyarakat dan negara, penyelesaian dan pemahaman masalah sosial terletak di tangan jurnalis dan redaktur (Slamet et al, 2017).

2.2.4 Tinjauan tentang Peran *Pentahelix* dalam Rehabilitasi

Pentahelix, juga dikenal sebagai model *Quintuple Helix*, adalah kerangka kerja yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama dalam inovasi dan pembangunan sosial. Model ini mencakup akademisi swasta, pemerintah, masyarakat sipil, dan media (*quintuple helix*). Peran *Pentahelix* dalam rehabilitasi adalah mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan ini untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa tinjauan tentang

peran *Pentahelix* dalam rehabilitasi:

- a. Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial: Dalam konteks rehabilitasi, *Pentahelix* dapat berperan dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial. Perguruan tinggi atau akademisi dapat menyediakan pengetahuan dan riset untuk memahami akar permasalahan sosial dan mengembangkan strategi intervensi yang efektif. Pemerintah dapat mengkoordinasikan kebijakan dan program rehabilitasi, sementara industri dapat memberikan dukungan finansial dan pelatihan kerja bagi mereka yang direhabilitasi. Masyarakat sipil dan media dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik, menghilangkan stigma, dan memberikan dukungan sosial kepada orang-orang terlantar yang direhabilitasi.
- b. Kolaborasi dan Kemitraan: *Pentahelix* mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan yang berbeda. Dalam konteks rehabilitasi, kerjasama antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat sipil, dan media/masyarakat dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, memperluas jaringan, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik.
- c. Inovasi Sosial: *Pentahelix* juga dapat mendorong inovasi sosial dalam rehabilitasi. Melalui kerjasama antara akademisi, swasta, pemerintah, masyarakat sipil, dan media/masyarakat, ide-ide baru dapat dihasilkan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, mengembangkan model baru, dan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan inovatif lainnya. Inovasi

sosial dapat membawa perubahan positif dalam upaya rehabilitasi dan meningkatkan kemandirian orang-orang terlantar yang direhabilitasi.

- d. Pengelolaan Pengetahuan dan Informasi: *Pentahelix* juga berperan dalam pengelolaan pengetahuan dan informasi terkait rehabilitasi. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat penelitian dan pendidikan, menghasilkan pengetahuan yang relevan dan melatih tenaga profesional dalam bidang rehabilitasi. Swasta dan pemerintah dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan memonitor progres rehabilitasi. Masyarakat sipil dan media/masyarakat dapat berperan dalam menyebarkan informasi, mengadvokasi kepentingan orang-orang terlantar, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu rehabilitasi.

1. Peran Pemerintah dalam Rehabilitasi

Berikut adalah tinjauan tentang peran pemerintah dalam rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix* menurut Aggestam (2015) :

- a. Pemerintah sebagai Pemegang Kekuasaan:

Dalam konteks *Pentahelix*, yang mencakup lima sektor yaitu pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media, pemerintah memegang peran kunci sebagai pemegang kekuasaan dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi. Pemerintah memiliki kapasitas untuk mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan undang-undang yang mendukung dan memfasilitasi rehabilitasi.

- b. Pemerintah sebagai Fasilitator Kolaborasi:

Pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik, swasta, akademik, masyarakat sipil, dan media dalam upaya

rehabilitasi. Pemerintah dapat mengadakan forum atau platform kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk berbagi ide, pengetahuan, dan sumber daya guna meningkatkan efektivitas intervensi rehabilitasi.

c. Pemerintah sebagai Pemberi Dukungan Finansial:

Pemerintah memiliki peran dalam memberikan dukungan finansial untuk program rehabilitasi. Ini dapat melibatkan alokasi anggaran dan sumber daya keuangan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi yang efektif. Pemerintah juga dapat mendorong partisipasi sektor bisnis dalam memberikan investasi sosial untuk mendukung upaya rehabilitasi.

d. Pemerintah sebagai Penyedia Infrastruktur:

Pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur fisik dan sosial yang mendukung rehabilitasi. Infrastruktur fisik mencakup fasilitas rehabilitasi, pusat layanan, dan aksesibilitas yang memadai. Infrastruktur sosial melibatkan kebijakan, program, dan layanan pendukung seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

e. Pemerintah sebagai Penegak Hukum:

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum dan keadilan bagi individu yang membutuhkan rehabilitasi. Pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak individu yang perlu direhabilitasi, serta menegakkan penegakan hukum untuk melawan diskriminasi, kekerasan, atau penyalahgunaan terhadap mereka.

f. Pemerintah sebagai Pengawas dan Evaluasi:

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi program rehabilitasi untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya. Mereka dapat melakukan pemantauan, inspeksi, dan evaluasi yang sistematis terhadap program rehabilitasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan program.

Dalam konteks *Pentahelix*, pemerintah memainkan peran penting sebagai pemegang kekuasaan, fasilitator kolaborasi, pemberi dukungan finansial, penyedia infrastruktur, penegak hukum, serta pengawas dan evaluator dalam upaya rehabilitasi. Kolaborasi antara pemerintah dengan sektor lainnya dalam *Pentahelix* dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program rehabilitasi.

2. Peran Akademisi dalam Rehabilitasi

Berikut adalah tinjauan tentang peran akademisi dalam rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix* Aggestam (2015):

a. Penelitian dan Pengembangan:

Akademisi berperan penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi. Mereka dapat melakukan studi akademik, survei, dan evaluasi program rehabilitasi untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi. Penelitian ini dapat memberikan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan dan praktik terbaik dalam rehabilitasi.

b. Pendidikan dan Pelatihan:

Akademisi dapat berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para profesional dan praktisi rehabilitasi. Mereka dapat mengembangkan kurikulum, modul, dan program pelatihan yang relevan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidang rehabilitasi. Akademisi juga dapat memberikan pengajaran langsung kepada mahasiswa dalam program studi terkait rehabilitasi.

c. Transfer Pengetahuan dan Penyebaran Informasi:

Akademisi memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan dan penyebaran informasi tentang rehabilitasi kepada pemangku kepentingan lainnya dalam *Pentahelix*. Mereka dapat mengorganisir seminar, konferensi, atau lokakarya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, dan penemuan terbaru dalam rehabilitasi. Akademisi juga dapat menerbitkan jurnal ilmiah dan publikasi lainnya untuk menyebarkan penelitian dan temuan terkait rehabilitasi.

d. Kemitraan dan Kolaborasi:

Akademisi dapat berperan dalam membangun kemitraan dan kolaborasi dengan sektor pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan media dalam konteks *Pentahelix*. Melalui kolaborasi ini, akademisi dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan, pengembangan program, dan implementasi praktik terbaik dalam rehabilitasi. Kemitraan ini juga dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman antara akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

e. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat:

Akademisi dapat berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan isu-isu rehabilitasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi. Mereka dapat melakukan penelitian, menyusun laporan kebijakan, atau mengorganisir kampanye untuk mempromosikan dukungan publik terhadap rehabilitasi. Akademisi juga dapat berkontribusi dalam merancang program pendidikan publik yang bertujuan untuk mengurangi stigma sosial terhadap kelompok yang membutuhkan rehabilitasi.

Melalui peran mereka dalam penelitian, pendidikan, transfer pengetahuan, kemitraan, dan advokasi, akademisi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix*. Kolaborasi antara akademisi dan sektor lainnya dalam *Pentahelix* dapat menghasilkan solusi inovatif, pemahaman yang lebih baik, dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik rehabilitasi.

3. Peran Swasta dalam Rehabilitasi

Berikut adalah tinjauan tentang peran sektor swasta dalam rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix* Aggestam (2015) :

a. Investasi Sosial:

Sektor swasta dapat berperan dalam memberikan investasi sosial untuk mendukung program rehabilitasi. Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya finansial, tenaga kerja, dan infrastruktur mereka untuk mendukung upaya rehabilitasi. Investasi sosial ini dapat berupa dukungan keuangan, donasi

barang atau layanan, atau keterlibatan dalam kemitraan dengan organisasi rehabilitasi.

b. Keterlibatan dalam Program dan Proyek:

Perusahaan dapat terlibat secara langsung dalam program dan proyek rehabilitasi. Mereka dapat menyediakan pelatihan keterampilan, peluang kerja, atau program magang bagi individu yang membutuhkan rehabilitasi. Selain itu, perusahaan juga dapat menyumbangkan produk atau layanan mereka untuk membantu program rehabilitasi.

c. Kemitraan dengan Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah:

Sektor swasta dapat membentuk kemitraan dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam upaya rehabilitasi. Melalui kemitraan ini, perusahaan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan, pengembangan program, dan implementasi praktik terbaik dalam rehabilitasi. Kemitraan ini juga dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman antara sektor swasta dan sektor lainnya dalam *Pentahelix*.

d. Promosi Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat:

Sektor swasta dapat menggunakan kekuatan mereka dalam mempromosikan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terkait rehabilitasi. Perusahaan dapat meluncurkan kampanye sosial, mengadakan acara atau seminar, atau menggunakan media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu rehabilitasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan atau pendidikan kepada

karyawan dan masyarakat tentang pentingnya inklusi dan dukungan terhadap individu yang membutuhkan rehabilitasi.

e. Inovasi dan Teknologi:

Sektor swasta dapat berperan dalam membawa inovasi dan teknologi terbaru ke dalam upaya rehabilitasi. Perusahaan dapat mengembangkan solusi teknologi, aplikasi, atau platform digital yang dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas program rehabilitasi. Inovasi ini dapat membantu memperluas jangkauan layanan, memfasilitasi pemantauan dan evaluasi program, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi.

Melalui investasi sosial, keterlibatan dalam program, kemitraan, promosi kesadaran, dan inovasi, sektor swasta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix*. Kolaborasi antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media dapat menciptakan peran yang kuat untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

4. Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi

Berikut adalah tinjauan tentang peran masyarakat dalam rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix* Aggestam (2015) :

a. Dukungan dan Perhatian:

Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan perhatian kepada individu yang membutuhkan rehabilitasi. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan praktis kepada individu yang

sedang dalam proses rehabilitasi. Dukungan ini dapat berupa pengakuan, penerimaan, dan dorongan untuk berubah serta memperbaiki diri.

b. Pemberdayaan dan Keterlibatan:

Masyarakat dapat berperan dalam pemberdayaan dan keterlibatan individu yang membutuhkan rehabilitasi. Mereka dapat memberikan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, atau pendidikan bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat membantu individu membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

c. Pencegahan dan Edukasi:

Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan masalah yang membutuhkan rehabilitasi. Mereka dapat menyediakan edukasi, informasi, dan kampanye kesadaran tentang isu-isu yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau kenakalan remaja. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

d. Advokasi dan Pengaruh Sosial:

Masyarakat dapat berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan isu-isu rehabilitasi. Mereka dapat melibatkan diri dalam kelompok masyarakat, LSM, atau gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dan dukungan untuk individu yang membutuhkan rehabilitasi. Melalui pengaruh sosial mereka, masyarakat dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang sedang dalam proses rehabilitasi.

e. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:

Masyarakat dapat berkolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam upaya rehabilitasi. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat, pertukaran pengetahuan, dan sumber daya yang lebih baik. Masyarakat dapat memberikan masukan, pengalaman, dan perspektif unik yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif.

Melalui dukungan, pemberdayaan, pencegahan, advokasi, dan kolaborasi, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix*. Peran aktif masyarakat dalam rehabilitasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung, dan memungkinkan individu untuk pulih dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

5. Peran Media dalam Rehabilitasi

Berikut adalah tinjauan tentang peran media dalam rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix* Aggestam (2015) :

a. Pemberitaan dan Kesadaran Publik:

Media memiliki peran penting dalam memberikan pemberitaan yang akurat dan berimbang tentang isu-isu rehabilitasi. Melalui pemberitaan yang tepat, media dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah sosial yang membutuhkan rehabilitasi, seperti penyalahgunaan narkoba, kesehatan mental, atau reintegrasi mantan narapidana. Pemberitaan ini dapat membantu

menghilangkan stigma dan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat.

b. Kampanye Sosial:

Media dapat berperan dalam meluncurkan kampanye sosial yang mendukung rehabilitasi. Mereka dapat menyediakan platform untuk mengampanyekan isu-isu rehabilitasi, mempromosikan praktik terbaik, dan memperjuangkan dukungan masyarakat. Kampanye ini dapat mencakup berbagai bentuk media, seperti iklan, artikel, program televisi atau radio, atau kampanye media sosial.

c. Edukasi dan Informasi:

Media dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang rehabilitasi. Mereka dapat menyediakan program televisi, radio, atau artikel yang menginformasikan tentang proses rehabilitasi, pilihan perawatan yang tersedia, atau sumber daya yang dapat diakses oleh individu yang membutuhkan rehabilitasi. Edukasi dan informasi yang akurat dapat membantu masyarakat memahami pentingnya rehabilitasi dan mencari bantuan yang diperlukan.

d. Narasi Positif dan Inspiratif:

Media dapat menggunakan kekuatan narasi positif dan inspiratif untuk mengubah persepsi masyarakat tentang individu yang sedang dalam proses rehabilitasi. Melalui cerita sukses dan perjalanan pemulihan yang menginspirasi, media dapat memperkuat keyakinan bahwa rehabilitasi adalah mungkin dan memberikan harapan bagi individu yang membutuhkan. Narasi

ini dapat mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi.

e. Kritis dan Mendorong Pertanggungjawaban:

Media dapat berperan dalam mengawasi dan mendorong pertanggungjawaban lembaga rehabilitasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya rehabilitasi. Dengan melakukan jurnalistik investigasi, media dapat membantu mengungkap kasus penyalahgunaan, kekurangan, atau praktik yang tidak etis dalam sistem rehabilitasi. Hal ini dapat mendorong perbaikan dan perubahan yang diperlukan dalam praktik dan kebijakan rehabilitasi.

Melalui pemberitaan, kampanye sosial, edukasi, narasi positif, dan fungsi pengawasan, media dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya rehabilitasi dalam konteks *Pentahelix*. Tanggung jawab media dalam memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik dapat membantu membangun masyarakat yang mendukung, inklusif, dan memungkinkan bagi individu yang membutuhkan rehabilitasi.

2.2.5 Tinjauan tentang Pekerja Sosial Lingkungan

1. Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan sosial, yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik pekerjaan sosial.

Sedangkan menurut Menurut Sri Rahayu (2017), pekerja sosial adalah profesi yang membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Pekerja sosial berperan dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi program pelayanan sosial.

2. Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas dan fungsi pekerja sosial berdasarkan undang-undang ini cukup komprehensif. Mereka bertugas untuk melakukan asesmen, intervensi, dan evaluasi terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi masalah sosial. Selain itu, pekerja sosial juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan bimbingan sosial guna meningkatkan keberfungsian sosial, serta melakukan advokasi dan pendampingan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

Undang-undang ini juga menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Mereka harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang pekerjaan sosial, serta bersertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi. Hal ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme pekerja sosial dalam menjalankan tugas dan perannya.

3. Metode Pekerja Sosial

Pekerja sosial di Indonesia menggunakan berbagai metode dalam praktiknya untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi.

Metode *casework* atau pertolongan perorangan merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh pekerja sosial. Dalam metode ini, pekerja sosial berinteraksi secara individual dengan klien untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membantu klien mencapai penyesuaian sosial yang lebih baik (Edi Suharto, 2009).

Selain metode *casework*, pekerja sosial juga menggunakan metode *groupwork* atau pertolongan kelompok. Dalam metode ini, pekerja sosial berinteraksi dengan klien dalam setting kelompok untuk membantu mereka mencapai tujuan bersama. Metode ini bertujuan untuk membantu klien mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berfungsi secara sosial (Adi Fahrudin, 2014).

Metode komunitas atau pengembangan masyarakat juga menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh pekerja sosial di Indonesia. Dalam metode ini, pekerja sosial berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi (Sri Rahayu, 2017).

Metode Cocd (Community Organization and Community Development) merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pekerja sosial dalam praktik pengembangan masyarakat di Indonesia. Metode ini berfokus pada upaya pengorganisasian dan pengembangan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan.

Menurut Edi Suharto (2009), metode Cocd (*Community Organization and Community Development*) dalam praktik pengembangan masyarakat di Indonesia memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) mengorganisasikan masyarakat agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi secara bersama-sama, 2) memfasilitasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta 3) memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan kegiatan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, pekerja sosial juga menggunakan metode administrasi pelayanan sosial, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan sosial yang diberikan (Abu Huraerah, 2011).

Penggunaan metode-metode tersebut oleh pekerja sosial di Indonesia bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial, meningkatkan keberfungsian sosial, serta mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik.

4. Pengertian *Green Social Worker*

Menurut Coates, J., & Gray, M. (2018). *Green social work: From environmental crises to environmental justice*. Routledge. ini memberikan gambaran umum mengenai konsep Green Social Work dan memperkenalkan pembaca pada isu-isu lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Penulis menjelaskan bagaimana pekerja sosial dapat berperan dalam mempromosikan keadilan lingkungan dan memberdayakan individu, keluarga, dan komunitas untuk berpartisipasi dalam upaya keberlanjutan.

Menurut Gray, M., Coates, J., & Yellow Bird, M. (Eds.). (2017). *Environmental social work*. Routledge. Buku ini menyajikan serangkaian esai oleh penulis dari berbagai latar belakang akademik dan geografis yang membahas peran pekerja sosial dalam memahami dan menangani tantangan lingkungan. Mereka mengeksplorasi berbagai isu seperti perubahan iklim, keadilan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pekerja sosial dapat berkontribusi dalam konteks tersebut.

5. Konsep *Green Social Worker*

Green social worker mengadopsi pendekatan holistik yang menggabungkan isu-isu sosial dengan isu-isu lingkungan. Mereka memahami bahwa kesejahteraan manusia dan kesehatan lingkungan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. *Green social worker* berupaya memahami dampak lingkungan terhadap individu, keluarga, dan komunitas, serta berperan dalam mempromosikan keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

6. Peran *Green Social Worker*

- a. Pendidikan dan Kesadaran: *Green social worker* berperan dalam memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan kepada individu, keluarga, dan komunitas. Mereka menyampaikan informasi tentang pentingnya keberlanjutan, praktik ramah lingkungan, dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh perubahan lingkungan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: *Green social worker* bekerja untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan. Mereka melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan, memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, dan mempromosikan aksi kolektif untuk keberlanjutan.
- c. Intervensi dan Dukungan: *Green social worker* memberikan dukungan dan intervensi kepada individu dan keluarga yang terdampak oleh masalah lingkungan. Mereka membantu individu mengatasi stres, trauma, atau perubahan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, serta memberikan sumber daya dan jaringan dukungan yang diperlukan.
- d. Advokasi dan Perubahan Kebijakan: *Green social worker* berperan sebagai advokat untuk keadilan lingkungan dan perubahan kebijakan. Mereka bekerja untuk mengidentifikasi ketimpangan lingkungan, memperjuangkan hak-hak lingkungan, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

7. Tantangan *Green Social Worker*

- a. Kompleksitas Isu Lingkungan: Isu lingkungan seringkali kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. *Green social worker* perlu memahami sains lingkungan, kebijakan publik, dan dampak sosial untuk dapat mengatasi tantangan ini secara efektif.
- b. Kolaborasi Antar Sektor: Solusi untuk isu lingkungan membutuhkan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. *Green social worker* perlu membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan bekerja secara lintas sektor untuk mencapai tujuan keberlanjutan.
- c. Ketahanan dan Pemulihan: *Green social worker* seringkali terlibat dalam situasi bencana alam atau perubahan lingkungan yang signifikan. Mereka dihadapkan pada tantangan pemulihan dan membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak tersebut.
- d. Kesadaran dan Keterampilan: *Green social worker* perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu lingkungan, kebijakan, dan praktik keberlanjutan. Mereka juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi, advokasi, dan kepemimpinan yang kuat untuk mempengaruhi perubahan positif.

8. Hubungan *Green social worker* dengan Rehabilitasi

Hubungan antara *Green social worker* dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Holistik: Baik *Green social worker* maupun rehabilitasi memiliki pendekatan yang holistik terhadap individu dan komunitas. Mereka melihat

individu sebagai bagian dari lingkungan sosial dan fisik yang lebih luas. *Green social worker* mengakui bahwa lingkungan yang sehat dan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam proses rehabilitasi. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa individu yang sedang menjalani rehabilitasi memiliki akses ke lingkungan yang mendukung dan mendorong pemulihan mereka.

- b. Pemberdayaan Individu: Baik *Green social worker* maupun rehabilitasi bertujuan untuk memberdayakan individu. *Green social worker* berusaha untuk memberdayakan individu dalam konteks lingkungan, sementara rehabilitasi berfokus pada memberdayakan individu yang mengalami masalah sosial atau keterbatasan dalam fungsi sosial. Keduanya bertujuan untuk membantu individu mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan lingkungan mereka.
- c. Keadilan Sosial: Konsep keadilan sosial merupakan elemen penting dalam pekerjaan *Green social worker* maupun rehabilitasi. Baik *Green social worker* maupun rehabilitasi berusaha untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan kesenjangan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas. Mereka bekerja untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi individu untuk mendapatkan akses dan dukungan yang mereka perlukan untuk pemulihan dan keberhasilan sosial.
- d. Komunitas dan Jaringan Dukungan: Baik *Green social worker* maupun rehabilitasi memahami pentingnya dukungan komunitas dan jaringan sosial dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. *Green social worker* bekerja untuk

melibatkan komunitas dalam upaya keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Sementara itu, rehabilitasi melibatkan komunitas dalam mendukung individu yang sedang dalam proses pemulihan dengan menciptakan jaringan dukungan yang kuat dan memanfaatkan sumber daya komunitas.

- e. Perubahan Sistemik: Baik *Green social worker* maupun rehabilitasi berupaya untuk menciptakan perubahan sistemik yang lebih luas. *Green social worker* bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik yang berkelanjutan secara lingkungan. Di sisi lain, rehabilitasi juga melibatkan advokasi dan perubahan kebijakan guna menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi.
- f. Dalam kesimpulan, *Green social worker* dan rehabilitasi memiliki banyak persamaan dan keterkaitan. Keduanya mengadopsi pendekatan holistik, mendorong pemberdayaan individu, berkomitmen pada keadilan sosial, menghargai peran komunitas dan jaringan dukungan, serta berupaya menciptakan perubahan sistemik. Kolaborasi antara *Green social worker* dan praktisi rehabilitasi dapat memperkuat efektivitas dan dampak positif dalam mempromosikan kesejahteraan individu dan keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan.